



Studi Literatur: Peran Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Revina Choirunnisa Ramadina^{1*}, Sri Trisaningsih²

¹⁻²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Email: 22013010160@student.upnjatim.ac.id¹, trisna.ak@upnjatim.ac.id²

*Penulis Korespondensi: trisna.ak@upnjatim.ac.id

Abstract. *This research seeks to analyze how balancing funds and Regional Original Revenue (PAD) contribute to regional financial performance through a literature review approach. The study is motivated by inconsistencies in prior findings as well as the crucial role of these two revenue components in strengthening the fiscal autonomy of local governments. The method applied involves a review of relevant academic studies published between 2022 and 2025, which were sourced from Google Scholar. The findings suggest that balancing funds are able to support improvements in financial performance when managed effectively, although their use may also lead to a higher level of dependence on the central government. In contrast, PAD generally shows a positive relationship with financial performance, as it represents a region's capacity to generate and manage its own revenue, even though several studies report that its influence is not always statistically significant. Overall, this study highlights the need for optimizing PAD management alongside ensuring that balancing funds are allocated in an efficient and transparent manner, in order to achieve sustainable improvements in regional financial performance.*

Keywords: *Balancing Funds; Financial Accountability; Fiscal Decentralization; Regional Financial Performance; Regional Original Income.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis bagaimana dana penyeimbang serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi pada kinerja keuangan daerah melalui pendekatan tinjauan pustaka. Studi ini dimotivasi oleh inkonsistensi dalam temuan sebelumnya serta peran penting kedua komponen pendapatan ini dalam memperkuat otonomi fiskal pemerintah daerah. Metode yang diterapkan melibatkan tinjauan studi akademis yang sejalan dengan penerbitan antar tahun 2022 sampai 2025, yang bersumber dari Google Scholar. Temuan menunjukkan bahwa dana penyeimbang mampu mendukung peningkatan kinerja keuangan bila dikelola secara efektif, meskipun penggunaannya juga dapat menyebabkan tingkat ketergantungan yang lebih tinggi pada pemerintahan pusat. Sebaliknya, PAD umumnya memperlihatkan hubungan positif dengan kinerja keuangan, karena mewakili kapasitas suatu daerah untuk menghasilkan dan mengelola pendapatannya sendiri, meskipun beberapa studi melaporkan bahwa pengaruhnya tidak selalu signifikan secara statistik. Secara keseluruhan, studi ini menyoroti perlunya optimalisasi pengelolaan PAD bersamaan dengan memastikan bahwa dana penyeimbang dialokasikan secara efisien dan transparan, untuk mencapai peningkatan kinerja keuangan daerah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan; Desentralisasi Fiskal; Kinerja Keuangan Regional; Pendapatan Asli Regional; Penyeimbangan Dana.

1. LATAR BELAKANG

Kinerja keuangan daerah mempunyai peran utama pada pelaksanaan pemerintahan daerah. Kualitas kinerja keuangan dapat dipakai untuk mengukur kesuksesan pemerintahan daerah ketika mengelola aspek keuangannya. Hal ini karena kinerja tersebut menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu memaksimalkan sumber pendapatan serta mendistribusikan anggaran secara efektif dan efisien guna mendukung peningkatan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Hijrianti *et al.*, 2025). Sehingga, tingkat kinerja keuangan daerah sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengatur serta

memaksimalkan berbagai sumber penghasilan yang dimilikinya. Demikian selaras dengan penelitian Mulia & Widiatmoko (2025) yang mengatakan bahwasanya pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan maksimal dapat memengaruhi kenaikan kinerja keuangan suatu daerah.

Mengarah pada ketentuan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, struktur dari penghasilan daerah pada dasarnya didapatkan dari dua komponen utama, yakni PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta dana dari pemerintah pusat, yang salah satunya diwujudkan berbentuk dana perimbangan (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 2014). Dana perimbangan berperan dalam menaikkan kapasitas fiskal daerah, khususnya bagi wilayah yang belum mampu mengoptimalkan sumber pendapatan mandirinya. Melalui skema tersebut, ketimpangan fiskal antar wilayah ditekan sebagai bentuk upaya dari pemerintah pusat sekaligus memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan konsep TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) yang dirumuskan sebagai upaya untuk mengurangi disparitas kapasitas fiskal antar wilayah di Indonesia, sekaligus mendorong pemerataan kemampuan keuangan (Purba & Simandjorang, 2024). Namun, dikarenakan bergantung pada dana perimbangan dapat mencerminkan masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Selain dana perimbangan, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dijadikan sumber pendapatan yang diperoleh dari potensi perekonomian lokal, seperti pajak daerah dan retribusi (Dinata *et al.*, 2024). PAD dapat digambarkan sebagai kemampuan pemerintah setempat untuk menggali serta mengatur sumber daya ekonomi secara mandiri. Peningkatan kontribusi PAD menunjukkan semakin baiknya kinerja keuangan daerah dalam mendanai keperluan dalam pembangunan tanpa dana dari pemerintahan pusat. Hal ini sejalan dengan penelitian Padang & Padang (2023) yang mengatakan bahwasanya PAD memberikan efek positif pada kinerja keuangan daerah. Sehingga, optimalisasi PAD menjadi aspek utama dalam menambah kinerja keuangan daerah.

Meskipun demikian, hasil temuan terkait dampak dari dana perimbangan serta PAD bagi kinerja keuangan daerah masih menunjukkan temuan yang beragam. Hasil penelitian Mulia & Widiatmoko (Mulia & Widiatmoko, 2025) memperlihatkan bahwasanya PAD serta dana perimbangan memberikan efek yang positif pada kinerja keuangan daerah. Walaupun demikian, sejumlah studi lain memperlihatkan temuan yang berbeda, di mana PAD tidak memberi dampak yang berarti untuk kinerja keuangan daerah (Kulsum & Wijaya, 2023). Selain itu, Yuliawati *et al.*, (2024) juga mengungkapkan bahwasanya dana perimbangan tidak memberi efek untuk kinerja keuangan pemerintahan daerah.

Perbedaan hasil tersebut menandakan bahwasanya peran kedua sumber penghasilan tersebut belum sepenuhnya konsisten saat memperjelas kinerja keuangan daerah. Berlandaskan kondisi tersebut, diperlukan kajian lebih lanjut untuk memahami secara komprehensif bagaimana peran Dana Perimbangan serta Pendapatan Asli Daerah dalam mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, pengamatan ini bertujuan untuk melakukan literature review mengenai hubungan kedua variabel tersebut terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga diharapkan dapat memberi gambaran yang lebih sistematis serta sebagai referensi dalam penentuan dalam regulasi mengelola keuangan daerah yang lebih optimal. Menurut (N. N. A. P. Putri et al., 2026), penelitian empiris terbaru menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara Dana Perimbangan cenderung berpengaruh negatif, yang mengindikasikan bahwa ketergantungan pada sumber pusat dapat mengurangi kemandirian fiskal lokal dan memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah menurut Wasil *et al.*, (2024:146) dapat diartikan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi seberapa jauh pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya dengan efektif serta efisien saat menjalankan fungsinya. Kinerja keuangan menurut Wicaksono & Sigalingging (2024) kemampuan daerah, ketergantungan fiskal, derajat desentralisasi, tingkat perkembangan. Efisiensi serta keefektifan dalam mengelola keuangan dapat digunakan dalam mempekirakan rasio keuangan.

Dana Perimbangan

Mengarah pada UU No. 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antar Pemerintahan Pusat dengan Daerah, dana perimbangan yakni distribusi yang berasal dari APBN yang diberikan terhadap pemerintah daerah guna mensubsidi berbagai keperluan daerah ketika menjalani kebijakan desentralisasi (Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004). Menurut Ardiansyah (2023), dana perimbangan yakni suatu instrumen terpenting dalam mengukur struktur penghasilan daerah yang sumbernya berasal dari dana pemerintahan pusat. Dana tersebut tersusun atas beberapa jenis penerimaan, di antaranya meliputi bagian daerah dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), pendapatan yang berasal dari pengelolaan SDA serta alokasi berupa DAU (Dana

Alokasi Umum) serta DAK (Dana Alokasi Khusus) yang diberikan untuk mendukung kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau PAD berlandaskan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014) yaitu pendapatan yang didapatkan sebuah wilayah yang diambil dengan menyesuaikan undang-undang yang sudah ditetapkan. Menurut Pramesti & Mildawati (2025) PAD yakni bentuk penerimaan yang diperoleh pemerintahan setempat dari beragam sumber yang sah disesuaikan pada ketentuan yang berlaku. Pajak setempat, retribusi setempat hingga hasil dari mengelola aset daerah sudah dipisahkan dan beberapa penerimaan lainnya dijadikan sumber penghasilan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan kualitatif memakai metode *literature review*. Metode ini dilakukan dengan membahas berbagai artikel penelitian terdahulu yang relevan yang diperoleh melalui *Google Scholar*. Proses pencarian literatur difokuskan pada kata kunci seperti dana perimbangan, PAD, serta kinerja keuangan daerah. Adapun jarak waktu publikasi yang dipakai untuk pengamatan ini adalah 5 tahun terakhir, yakni periode 2022 hingga 2026, untuk memastikan relevansi dan kebaruan referensi yang digunakan. Selanjutnya, peneliti melakukan penelaahan dan analisis terhadap artikel-artikel yang telah dikumpulkan dengan menyesuaikan hasil temuan dengan tujuan penelitian. Hasil kajian tersebut kemudian diinterpretasikan sebagai dasar dalam merumuskan serta mengarahkan pengembangan penelitian selanjutnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tabel 4.1 menyajikan rangkuman penelitian sebelumnya yang selaras dengan kajian ini, khususnya terkait peran PAD serta dana perimbangan pada kinerja keuangan daerah, yang dipakai menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut.

Tabel 1. Ringkasan Review Artikel.

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	(Amanda Yecci Noeng, Yuliana Anggreani Dua Delang Kolit, Elisabeth Yessi Da Rato, 2023)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi NTT Periode 2016-2020)”	Berdasarkan analisis berikut, memberikan hasil bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Sementara itu, PAD kurang menunjukkan efek yang bermakna pada kinerja keuangan daerah.
2.	(Salsabila Pramestya Putri & Dyah Ratnawati, 2023)	“Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SI.LPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memberi dampak positif pada kinerja keuangan pemerintahan daerah, serta untuk dana perimbangan justru memberikan efek negatif. pada kinerja keuangan pemerintah.
3.	(Dwi Ratnasari & Dianita Meirini, 2022)	“Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan SILPA dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan”	Hasil penelitian memperlihatkan bahwasanya PAD tidak memberikan pengaruh untuk kinerja keuangan. Sebaliknya, dana perimbangan memberikan efek negatif secara berarti untuk kinerja keuangan.
4.	(Andre Dwi Saputra & Lintang Kurniawati, 2026)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa PAD memberikan kontribusi positif yang signifikan padakerja keuangan, walaupun DAU berdampak negatif secara berarti. Adapun DAK, dana bagi hasil, tidak memberikan dampak yang berarti pada kinerja keuangan.
5.	(Jeni Wardi, 2024)	“Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota XYZ Tahun 2017-2021”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan sertapendapatan asli daerah memiliki pengaruh untukkinerja keuangan pemerintah daerah.

6.	(Wuri Handayani, Yulitiawati, Istiza, 2025)	Septi Desi	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019”	Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh dari PAD pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, dana perimbangan terbukti memberi efek negatif yang berarti bagi kinerja keuangan pemerintahan daerah.
7.	(Yunita Rahayu, Tatas Ridho Nugroho, Nurdiana Fitri Isnaini, Hartono, 2023)	Widya	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Belanja Sosial Sebagai Variabel Intervening”	Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah berkontribusi positif terhadap kinerja keuangan. Di sisi lain, dana perimbangan serta belanja bantuan sosial tidak memberi efek yang bermakna. Lebih lanjut, belanja bantuan sosial tidak berperan dalam memperkuat keterkaitan antara PAD serta dana perimbangan dengan kinerja keuangan.
8.	(Ni Putu Ayu Septiyani Putri & Gede Adi Yuniarta, 2023)	Ayu	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2017-2021”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PAD memberi efek positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah. Sedangkan variabel dana perimbangan mempunyai dampak kurang serta tidak bermakna pada kinerja keuangan pemerintah daerah.
9.	(Ika Novita Ardelia, Hilda Kumala Wulandari, Yenny Ernitawati & Dumadi, 2022)		Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan	Hasil temuan menunjukkan bahwa PAD serta dana perimbangan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

10.	(Rangga Pangestu, 2023)	Periode 2016-2020) Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota	Hasil temuan memperlihatkan bahwasanya dana perimbangan mempunyai pengaruh negatif, sementara PAD memberi efek positif untuk kinerja keuangan pemerintah daerah.
-----	-------------------------	---	--

Sumber: data diolah penulis, 2026

Berlandaskan Tabel 4.1, disajikan ringkasan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa telah banyak studi yang mengkaji peran dana perimbangan serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan daerah. Dari hasil temuan tersebut memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan temuan antar penelitian, sehingga menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut.

Peran Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Menurut hasil analisis penelitian terdahulu, dana perimbangan mempunyai peran pada kinerja keuangan daerah. Optimalisasi pemanfaatan dana perimbangan dari pemerintahan pusat dapat menambah kinerja keuangan, sebagaimana ditunjukkan oleh Noeng *et al.*, (2023) yang menunjukkan dampak positif serta signifikan. Selain itu, pengelolaan yang efektif juga mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah (Faturrahman, 2025). Namun, di sisi lain, bergantung pada terhadap dana perimbangan dapat menurunkan kemandirian fiskal (Arief, 2025). Hal ini sejalan dengan Putri & Ratnawati (2023) yang menemukan kinerja keuangan mendapatkan dampak negatif dari dana perimbangan, yang diakibatkan oleh dominasi dana transfer yang kurang mencerminkan kemampuan keuangan daerah secara mandiri. Sehingga, dalam mengelola dana perimbangan yang tepat serta akuntabel agar dapat memberikan kontribusi optimal pada kinerja keuangan daerah.

Perbedaan temuan terkait dampak dari dana perimbangan pada kinerja keuangan daerah memperlihatkan bahwasannya efektivitas dana perimbangan menyesuaikan pada keadaan serta karakter setiap daerah. Ketergantungan berlebih pada dana perimbangan dikarenakan kapasitas fiskal yang terbatas, sehingga pemanfaatannya belum sepenuhnya mampu meningkatkan kinerja keuangan secara optimal. Sebaliknya, daerah yang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik dapat memanfaatkan dana perimbangan secara lebih efektif dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Dengan demikian, dampak dana

perimbangan pada kinerja keuangan tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh tingkat kemandirian fiskal serta kualitas saat mengatur keuangan dari setiap daerah.

Peran Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berlandaskan hasil kajian dari berbagai penelitian empiris terbaru. PAD terbukti memiliki kontribusi untuk kinerja keuangan pemerintah daerah. Kenaikan PAD mencerminkan kinerja daerah saat mengatur serta memaksimalkan sumber pendapatan internalnya, maka dapat memberikan dampak bagi peningkatan kualitas kinerja keuangan. Demikian sejalan dengan temuan oleh (Saputra & Kurniawati (2025) yang mengatakan bahwasanya PAD mempunyai dampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, semua daerah tidak dapat memaksimalkan peran PAD secara optimal. Pada beberapa kasus, kontribusi PAD yang relatif kecil menyebabkan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan menjadi kurang signifikan. Hal ini didukung oleh penelitian dari Ratnasari & Meirini (2022) yang mengatakan bahwasanya PAD tidak memberikan dampak pada kinerja keuangan daerah. Kondisi ini biasanya terjadi pada daerah dengan potensi ekonomi yang terbatas atau sistem pengelolaan pendapatan yang belum optimal. Oleh karena itu, efektivitas PAD dalam meningkatkan kinerja keuangan sangat bergantung pada kesanggupan pemerintahan daerah untuk mengenali potensi pendapatan serta mengelolanya secara efisien dan akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil pembahasan, dapat penulis simpulkan bahwasanya dana perimbangan serta PAD sama-sama memiliki dampak pada kinerja keuangan daerah, meskipun hasilnya bervariasi antar penelitian. Dana perimbangan mampu meningkatkan kinerja keuangan apabila dimanfaatkan secara optimal, namun juga dapat menimbulkan ketergantungan yang berdampak pada rendahnya kemandirian fiskal. Di sisi lain, PAD umumnya memberikan kontribusi positif dikarenakan menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya secara mandiri, meskipun pada beberapa daerah pengaruhnya belum signifikan akibat keterbatasan potensi dan pengelolaan. Oleh karena itu, besarnya pengaruh kedua variabel tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi serta kapasitas masing-masing daerah.

Sebagai implikasi, pemerintah daerah perlu meningkatkan optimalisasi PAD serta memastikan pengelolaan dana perimbangan dilakukan secara efisien dan transparan agar kinerja keuangan dapat lebih baik. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi literatur, sehingga penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan data empiris dengan lingkup yang lebih luas serta menambahkan variabel pendukung lainnya agar hasil yang diperoleh lebih menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

- Ardiansyah, R. (2023). Determinan Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *JPRO*, 4(1), 92–106.
- Arief, M. Z. (2025). Tantangan, Implikasi, dan Strategi Ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(9), 7175–7180.
- Dinata, M. S., Aprilia, N. A., Yudhasamara, S. P., & Susilo, D. E. (2024). Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 6(1), 177–190.
- Faturrahman. (2025). Peran Dana Perimbangan dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Tengah. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 19(1), 99–114.
- Hijrianti, Z. L. S., Winarni, D., Amir, & Pramono, H. (2025). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(2), 2408–2423.
- Kulsum, U., & Wijaya, A. R. (2023). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan. *Seminar Nasional – Universitas Borobudur*, 2(1), 296–317.
- Mulia, S., & Widiatmoko, J. (2025). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Periode 2019-2023). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 9(1), 2142–2161.
- Noeng, A. Y., Kolit, Y. A. D. D., & Rato, E. Y. Da. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi NTT Periode 2016-2020). *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, 2(2), 184–190. <https://doi.org/10.59603/accounting.v2i2.184>
- Padang, N. N., & Padang, W. S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, 9(2), 287–302.
- Pramesti, I. O., & Mildawati, T. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 14(3), 3–16.
- Purba, S. F., & Simandjorang, B. M. T. V. (2024). Pengaruh Dana Perimbangan dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. *Indonesian Treasury Review*, 9(2), 141–155.
- Putri, N. N. A. P., Adi, I. K. Y., & Adnantara, K. F. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *RIGGS*, 5(1), 12888–12899. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7877>
- Putri, S. P., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh PAD , Dana Perimbangan , dan SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah (JESYA)*, 6(2), 2068–2082.
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja

- Modal, dan SILPA dalam Pengaruhnya Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi (JAK)*, 17(1), 38–47.
- Saputra, A. D., & Kurniawati, L. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Indonesian Journal of Digital Business*, 5(4), 2572–2580.
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2004).
- Wasil, M., Cahyono, H., Rachmawati, L., Restikasari, W., & Ma, ruf, A. (2024). *Ekonomi Publik*. CV. Bravo Press Indonesia.
- Wicaksono, Y. S., & Sigalingging, E. D. (2024). Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2022. *Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan (JUSAPAK)*, 2(2), 67–79.
- Yuliawati, S., Zuliyana, M., & Rani, S. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti*, 6(1), 13–29.